

STRATEGI KERJASAMA ANTARA INDONESIA DENGAN TIONGKOK PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI TERKAIT ISU POROS MARITIM DUNIA GUNA PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA

Hardi Alunaza¹, Maya Bofa¹, Eko Suparman¹

¹*Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura*

Email Korespondensi: hardialunaza@gmail

Abstrak

Tulisan ini disajikan guna menjawab pertanyaan bagaimana kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Jokowi Widodo guna menyikapi isu terkait poros maritim dunia dalam proses penguatan diplomasi ekonomi Indonesia. Tulisan ini mencoba menganalisa dengan kebijakan luar negeri, serta konsep *soft power* untuk menjelaskan fenomena terkait. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sumber data dalam tulisan ini berasal dari studi pustaka dengan telaah buku, jurnal, laporan penelitian, serta data dari internet dengan sumber yang terpercaya yang digunakan untuk menjelaskan fenomena lebih jauh. Hasil dari tulisan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia pada masa Jokowi mencoba untuk terus kontinu melakukan kerja sama dengan Tiongkok dengan maksud untuk menambah jumlah frekuensi kerja sama antara kedua negara. Hal tersebut dilakukan oleh Jokowi dengan menekankan pada empat poin penting. Pertama, menggunakan identitas maritim dalam perancangan kerja sama internasional dan diplomasi ekonomi. Kedua, mengembangkan peran global melalui pendekatan diplomasi. Ketiga, penguatan diplomasi ekonomi melalui proses kerja sama di berbagai sektor seperti infrastruktur, industri, pariwisata, dan perbankan. Keempat, Jokowi mencoba menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam isu poros maritim dunia menyusul Tiongkok sebagai bagian dari Nawacita yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Poros Maritim Dunia, Diplomasi Ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut 93.000 km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km. Negara ini berada pada posisi geografis yang strategis di jalur perairan dunia sehingga sangat menguntungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia adalah jalur laut yang menghubungkan laut dari Aceh hingga Papua antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia (Prameswari, 2016). Jalur laut ini merupakan kekuatan bagi Indonesia untuk mengembangkan negaranya. Selain itu melalui letaknya yang strategis Indonesia dapat melakukan hubungan baik politik maupun ekonomi dengan 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia. Selain itu Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di laut untuk mensejahterakan rakyatnya.

Potensi sebagai negara yang memiliki letak geografis dan geopolitik yang strategis membuat negara ini dijadikan jalur pelayaran dan komunikasi internasional yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Rusia, Australia dan negara-negara di sekitar Asia. Selain letaknya Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya laut dimulai dari ikan, terumbu karang, minyak, maupun keindahan wisata lautnya. Hal ini merupakan keuntungan besar bagi Indonesia dalam menerapkan konsep poros maritim dunia.

Dalam sejarah maritim Asia, jalur yang ditempuh pedagang China, Jalur Sutra, terdiri dari darat dan laut. Jalur darat mempunyai rute yang melalui China, Asia Tengah, India, dan Asia Barat. Jalur laut merupakan kelanjutan dari jalur darat yang dimulai dari Teluk Persia sampai Laut Merah. Selain itu, jalur laut juga dapat

ditempuh dari Teluk Benggala sampai ke Teluk Persia. (Matondang, 2014: 1) Indonesia merupakan negara maritim dan sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan laut yang penting sejak masa prasejarah, khususnya di Selat Malaka. Namun, hubungan perdagangan Nusantara dengan China dan India baru dimulai pada abad ke-3 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan tulisan dari Fa-Hsien, yang berlayar dari India ke China melalui Jawa. (Matondang, 2014: 4)

Walaupun Indonesia merupakan negara maritim sejak masa prasejarah, pemanfaatan potensi ekonomi laut masih belum maksimal karena pemerintah tidak terlalu serius menggarap sektor kelautan dan perikanan (Zielonka, 2015: 3). Pembangunan dan ekonomi Indonesia masih berbasis pada eksplorasi dan pengolahan wilayah daratan, padahal perairan Indonesia lebih luas dan potensial untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut yang mendasari pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan visi poros maritim dunia.

Visi pembentukan poros maritim dunia tersebut tidak hanya menjadi kebijakan dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Hal tersebut berkaitan dengan kapal asing ataupun negara lain yang juga memerlukan wilayah perairan Indonesia, tidak hanya untuk sebagai jalur pelayaran, tetapi juga sebagai tempat melakukan bisnis. Apalagi kebijakan tersebut sudah dipaparkan Jokowi di dalam *East Asian Summit* (EAS), yang merupakan forum interaksi pemimpin-pemimpin dari pelbagai negara. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan poros maritim dunia merupakan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini (Pujayanti: 19).

Sektor pertama adalah kerja sama maritim. Visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebangun dengan rencana pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, membangun Jalan Sutra Maritim Baru (New Maritime Silk Road). Pejabat dan para pengamat Tiongkok dalam beragam kesempatan memaparkan bahwa rencana itu bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan meningkatkan kapasitas negara-negara di Asia

Tenggara untuk memaksimalkan keamanan dan pengelolaan sumber daya maritim.

Ide tersebut jelas berpotensi besar untuk disinergikan dengan usaha Indonesia mencapai suatu kedaulatan maritim. Dengan kata lain, kerja sama maritim jelas dapat menjadi inisiatif yang membuat hubungan RI-RRT terus bergerak maju dan saling menguntungkan. Dalam konteks kepentingan Indonesia memperbaiki infrastruktur pendukung dalam usaha meningkatkan keterhubungan yang kemudian akan berkontribusi positif pada pengembangan ekonomi maritim, kerja sama kedua negara akan berperan amat penting.

Sektor kedua adalah kerja sama mengelola stabilitas kawasan. Isu ini amat terkait dengan kondisi terakhir sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan yang masih belum memiliki capaian signifikan setelah penandatanganan Deklarasi Tata Perilaku (Declaration of Conduct of Parties) pada 2002. Dalam masa kampanye lalu, Jokowi sempat menggarisbawahi posisi Indonesia sebagai negara bukan pengklaim (non-claimant state), yang kemudian dikonfirmasi mantan Menlu Marty Natalegawa.

Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri bahwa dalam proses yang telah berlangsung dalam usaha mengelola sengketa tersebut, Indonesia turut berperan aktif, bahkan telah mengambil berbagai inisiatif dengan maksud berkontribusi positif pada pengelolaan konflik. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa dinamika penyelesaian damai sengketa di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat tidak melibatkan Indonesia. Dalam hal inilah, peran dan sikap kooperatif Indonesia akan sangat bermakna bagi Tiongkok, yang dengan secara terbuka telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dialog damai.

Sektor ketiga adalah kerja sama peningkatan hubungan antarwarga. Kini, hubungan internasional telah memasuki era yang di dalamnya interaksi antar bangsa tidak melulu didominasi interaksi pejabat resmi yang cenderung elitis. Hal ini yang mungkin ditangkap Presiden Jokowi, yang kemudian terefleksi dalam konsep diplomasi yang

membumi. Sekalipun kebijakan luar negeri utamanya tetap menjadi domain para birokrat, publik termasuk pemegang saham utama yang dapat memengaruhi secara signifikan, baik pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Hal ini mengisyaratkan bahwa hubungan antarwarga kedua negara akan sangat menentukan dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok. Interaksi antarwarga yang dimaksud bukanlah dalam arti sempit, arus masuk keluar wisatawan setiap negara, melainkan seluas-luasnya hingga mencakup beragam kalangan, termasuk akademisi, seniman, budayawan, dan kelompok-kelompok agama. Amat penting mendorong warga kedua negara untuk dapat saling memahami. Lebih dari tiga puluh tahun, pada masa pembekuan hubungan diplomatik, warga kedua negara belajar untuk saling mencurigai dan melihat satu sama lain sebagai ancaman. Akibatnya, kedua belah pihak perlu meningkatkan interaksi dan pertukaran antarwarga demi keberlangsungan hubungan kooperatif Indonesia-Tiongkok yang saling menguntungkan satu sama lain.

Teori Kebijakan Luar Negeri

Menurut Mark R. Amstutz, kebijakan luar negeri sebagai *explicit action of governmental officials designed to promote national interest beyond a country territorial boundaries* (Amstutz, 1995: 64). Dalam definisi ini terdapat tiga tekanan utama, yaitu: tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Sedangkan menurut Howard Lentner, pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan, yaitu: penentuan tujuan yang hendak dicapai (*selection of objective*), pengalokasian sumber daya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*) dan pelaksanaan (*implementation*) dari kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumber daya yang sudah ditetapkan (Lentner, 1974: 64).

Definisi dari kebijakan luar negeri menurut Rosenau adalah upaya suatu Negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri ini digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara. Negara merupakan aktor yang ada dalam politik luar negeri namun tidak hanya negara namun aktor non-negara biasanya juga ikut dalam melakukan hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan strategi yang digunakan untuk memenuhi kepentingan nasional dan biasanya selalu terkait dengan keadaan dan lingkungan yang ada di dalam negeri. Politik luar negeri muncul karena adanya pengaruh eksternal dan juga internal suatu negara, hal inilah yang menjadi input bagi sebuah negara untuk mengeluarkan output yang dilakukan oleh para pembuat keputusan. Kebijakan ini biasanya diambil sesuai dengan keadaan, sarana dan juga tujuan yang ingin di capai oleh suatu negara. Menurut James N. Rosenau, terdapat lima sumber yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, diantaranya adalah 1.) Idiosinkretik, berhubungan dengan karakteristik individu dari pembuat keputusan; 2.) Governmental, faktor pemerintah; 3.) Societal, faktor masyarakat; 4.) Peran dari pembuat keputusan; 5.) Sistemik.

Di Indonesia kebijakan yang dibuat akan sesuai dengan karakteristik pemimpin dan juga kondisi negara Indonesia pada masa itu. Politik luar negeri Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan politik luar negeri yang diambil para pembuat keputusan khususnya di masa pemerintahan presiden Soekarno dan Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Selain itu politik luar negeri Indonesia sebagai poros maritim dunia juga sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Joko Widodo Indonesia mencoba untuk selalu mengambil kebijakan yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan laut Indonesia namun memang terdapat perbedaan dari setiap era pemerintahan di Indonesia.

Konsep Soft Power

Power adalah kemampuan suatu aktor baik individu kelompok atau negara-bangsa untuk

mempengaruhi pikiran dan tingkah laku aktor lain sehingga mau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukainya (Mas'ood, 1990: 98). Secara Sederhana *power* merupakan kemampuan untuk mengontrol atau menguasai sesuatu. Tujuan berdirinya suatu negara sendiri ialah mengutamakan pencapaian *powernya* kepada negara lain. *Soft power* menekankan pada penguasaan terhadap bentuk-bentuk kekuatan nasional suatu negara yang tidak terlihat seperti ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai moral (*intangible resources*).

Soft power diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan cara menarik perhatian pihak lain, daripada mempermainkan mereka dengan dorongan materi, kemampuan ini lebih kepada mengajak membujuk daripada memaksa. *Soft power* merupakan kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi aktor lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tidak melalui pemaksaan yang bersifat kekerasan. Kemampuan ini sendiri dapat diwujudkan dengan tiga cara yaitu menarik (*attract*), memikat (*entice*), dan menjadikan milik (Liriyanti, 2011: 18).

Joseph Nye menyatakan bahwa terdapat tiga sumber kekuatan dari *soft power* yaitu, kebudayaan, ideologi politik dan kebijakan luar negeri (David, 2008: 10).

....*soft power of a country "rests primarily on three resources: its culture (inplaces where it is attractive to others), its political values (when it lives up to them at home and abroad), and its foreign policies (when they are seen as legitimate and having moral authority)".*

Soft power dapat diaktualisasikan sebagai kekuatan nasional suatu negara, yang didasarkan pada nilai-nilai, ideologi dan ciri-ciri budaya yang secara konkret dapat diperlihatkan melalui kebijakan dan perilaku negara atau produk-produk yang dihasilkan oleh negara tersebut seperti gaya hidup, musik, film, dan makanan yang dikonsumsi secara luas.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dalam penelitian ini lebih menggambarkan tentang kedaulatan Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia. Serta menggambarkan bagaimana pengembangan Politik luar negeri Indonesia menuju poros maritim dunia. Jenis data yang disajikan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen dan artikel yang dinilai sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang dianggap memiliki hubungan saling keterkaitan dengan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo.

Kerja sama Antara Indonesia Dengan Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Jokowi Terkait Isu Poros Maritim Dunia

Di tengah aneka tantangan yang pasti ada dalam hubungan Indonesia-Tiongkok kini dan pada masa depan, tiga kesempatan kerja sama tampaknya mengisyaratkan bahwa hubungan keduanya yang kooperatif perlu dilanjutkan. Dengan kapasitas yang dimiliki sekarang, Tiongkok menawarkan beragam kesempatan dalam platform baru diplomasi Presiden Jokowi yang telah menetapkan bahwa pelaksanaan kebijakan luar negeri tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Di lain pihak, Indonesia pun dengan peran dan kapasitasnya di kawasan, berpotensi besar untuk berkontribusi positif bagi diplomasi Tiongkok terhadap negara-negara tetangganya. Hubungan yang saling menguntungkan pun, dengan demikian, dapat terus diwujudkan dengan dasar saling percaya dan memahami (Khurana, 2008: 5).

Hal ini menunjukkan semakin terbatas alasan Indonesia untuk tidak merangkul Tiongkok ke depan. Hubungan antara Indonesia dan China adalah satu hal yang amat penting,

baik bagi Indonesia maupun untuk China sendiri. Hubungan Bilateral Indonesia-China yang pernah membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, kini makin membaik, dan bahkan China merupakan salah satu mitra yang penting bagi Indonesia. Secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka (Intan Sari, 2016: 5). Sedangkan secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini jelas sangat menggoda negara-negara industri yang sedang maju saat ini seperti China untuk menguasainya, langsung ataupun tidak langsung. Di samping itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 243 juta jiwa, Indonesia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara-negara industri.

Sedangkan China sendiri adalah dulunya merupakan negara berkembang yang dimana pemerintahnya masih menerapkan sistem tertutup dan belum terbuka dengan negara lainnya, akan tetapi kini sudah berubah menjadi negara maju yang perekonomiannya terus berkembang pesat bahkan sudah mengalahkan perkembangan negara-negara di kawasan Eropa, dan China sekarang adalah negara yang sangat terbuka dengan investasi asing semenjak liberalisasi ekonomi yang dibawa pada tahun 1979 oleh Den Xioping.

Pemerintahan Indonesia dipastikan bakal menguatkan hubungan bilateralnya dengan pemerintahan Tiongkok menyusul hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Beijing. Dalam kunjungan kenegaraan Jokowi yang diterima langsung Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, kedua kepala negara tersebut terlibat dalam pembicaraan yang masif mengenai penguatan kerja sama di bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antar masyarakat. Selain kerja sama perdagangan hingga isu kawasan, kedua presiden juga menyepakati kerja sama bilateral demi mensinergikan gagasan Poros Maritim Dunia dan Inisiatif Jalan Sutera

Maritim Abad 21 atau yang dikenal 21st Century Maritim Silk Road (Perwita: 4). Gagasan poros maritim dunia sendiri disepakati guna merealisasikan konektivitas maritim di kawasan melalui pembangunan infrastruktur.

Kemudian ada 7 dokumen kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pemerintahan Indonesia dan China :

1. MoU Kerja sama Ekonomi antara MENKO Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT.
2. MoU Kerja sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN
3. MoU antara menteri BUMN dengan komisi Nasional pembangunan dan Reformasi RRT untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
4. MoU antara Badan SAR Nasional (BASARNAS) RI Menteri Transportasi RRT
5. Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintahan RI dan RRT untuk pencegahan pajak berganda
6. MoU antara Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Badan Antariksa RRT
7. MoU Kerja sama antara Menteri BUMN dengan China Development Bank Corporation (CDBC)

Kemudian dari pada itu ada beberapa titik atau beberapa sektor yang secara garis besar dikuatkan oleh pemerintahan Jokowi dinilai sangat penting untuk melihat lebih jauh dalam perkembangannya. Sektor pertama adalah kerja sama maritim. Visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebangun dengan rencana pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, membangun Jalan Sutra Maritim Baru (New Maritime Silk Road). Pejabat dan para pengamat Tiongkok dalam beragam kesempatan memaparkan bahwa rencana itu bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan meningkatkan kapasitas negara-negara di Asia Tenggara untuk memaksimalkan keamanan dan

pengelolaan sumber daya maritim (Soebagjo, 2015: 6).

Mengenai sektor pertama yaitu kemaritiman yang memang sudah dicanangkan Jokowi pada saat kampanye. Ide tersebut jelas berpotensi besar untuk disinergikan dengan usaha Indonesia mencapai suatu kedaulatan maritim. Dengan kata lain, kerja sama maritim jelas dapat menjadi inisiatif yang membuat hubungan RI-RRT terus bergerak maju dan saling menguntungkan. Dalam konteks kepentingan Indonesia memperbaiki infrastruktur pendukung dalam usaha meningkatkan keterhubungan yang kemudian akan berkontribusi positif pada pengembangan ekonomi maritim, kerja sama kedua negara akan berperan amat penting.

Kemudian pada sektor ekspor-impor, banyak produk-produk China yang masuk kedalam pasar Indonesia. Dengan harga yang relatif murah dan juga dari segi kualitas juga tidak kalah berbeda dengan barang-barang bermerek lainnya, membuat produk China diserbu oleh konsumen Indonesia yang rata-rata dalam memilih suatu produk dilihat dari harga juga terjangkau. Produk yang membanjiri di pasar Indonesia meliputi ; tekstil, alas kaki, elektronika, ban, furnitur, industri permesinan, mainan anak-anak, serta otomotif, dan juga masih banyak lagi produk-produk dari China yang membanjiri pasar Indonesia. Terlebih masyarakat Indonesia yang konsumtif menjadikan peluang yang besar bagi China untuk bisa mempertahankan kerja sama dan berhubungan baik kepada Indonesia karena mempunyai peluang yang sangat besar dalam hal ini.

Lalu Indonesia, hanya bisa mengirim bahan-bahan mentah hasil bumi dan ini dijadikan bahan komoditas biasa untuk ekspor ke China. Untuk meng-ekspor ke China yang paling dominan sekali untuk Indonesia adalah ekspor biji kakao, dimana harganya juga relatif lebih murah. Indonesia juga memang dikenal sebagai penghasil biji kakao yang baik dan berkualitas tinggi, tidak heran kalau sektor inilah yang menjadi andalan untuk ekspor ke China terlepas dari lainnya. Untuk memajukan ekspor ini

Indonesia harus mengasih perhatian yang serius dalam hal pengelolaan dan lain-lain sehingga ekspor atau pendapatan bisa maksimal. Dengan tidak hanya mengeksport bahan mentah atau hasil bumi saja paling tidak Indonesia harus sudah bisa mengeksport barang yang sudah setengah jadi bahkan yang sudah jadi, sehingga pendapatan akan relatif besar .

Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

- Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
- Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
- Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
- Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
- Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Wajar jika beberapa negara adidaya, berebut pengaruh untuk menguasai sektor maritim Indonesia dengan memanfaatkan program penguatan sektor maritim sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Adapun penguatan sektor maritim memang sudah dicanangkan oleh Menteri Koordinasi Kemaritiman Indroyono Susilo kepada pers beberapa waktu lalu. Konsep penguatan sektor maritim bertumpu pada ketersediaan kapal-kapal besar yang rutin hilir mudik dengan frekuensi tinggi dari ujung barat di Aceh sampai ujung

timur di Papua, atau dari ujung utara sampai ujung selatan Indonesia. Melalui penerapan konsep ini, diharapkan ada peningkatan frekuensi perdagangan antarpulau dan antardaerah (Hendrajit, 2014).

Selain itu, Menko Kemaritiman Indroyono juga mencanangkan perlunya pembangunan infrastruktur yang mendahului pembangunan Tol Laut sebagaimana yang menjadi program unggulan Jokowi. Seperti misalnya dengan memperkuat jalur utama pelayaran. Untuk itu, Menko Indroyono menekankan ada empat pelabuhan yang perlu segera dibangun di empat titik jalur utama pelayaran dari barat hingga timur Indonesia, yaitu Belawan, Jakarta, Makasar, dan Sorong. Yang tak kalah penting terkait program pembangunan sektor maritim adalah kesiapan industri nasional kita. Maka dari itu, pembangunan memperkuat sektor maritim harus bersinergi dengan kementerian-kementerian lain khususnya ekonomi. Karena pada perkembangannya kemudian, hal ini menjadi tantangan untuk mengembangkan ekonomi kelautan. Yang itu berarti, seluruh kegiatan ekonomi akan dipusatkan di beberapa wilayah pesisir dan di lautan. Sehingga mau tidak mau, para pemangku kepentingan ekonomi kelautan akan memusatkan perhatiannya pada beberapa sektor seperti perikanan, industri pengolahan, bahari, dan sebagainya.

Mengingat luasnya lingkup pembangunan sektor maritim dan kelautan, nampaknya terlalu riskan jika pemerintah Indonesia hanya mengandalkan pada ajakan bantuan kerja sama dari Pemerintah Cina. Skema tawaran kerja sama Cina kepada Indonesia melalui SERB dan MSRP, memang menjadi sebuah pola baku Cina untuk mengedepankan kerja sama *government to government* dalam kerangka kerja sama bilateral. Dalam perhitungan Cina, pola kerja sama bilateral akan jauh lebih menguntungkan negara tirai bambu tersebut untuk mengatur dan mengendalikan negara mitra-nya, termasuk Indonesia (Hendrajit, 2015).

Selain berbagai aspek diatas pemerintah juga melakukan diplomasi ekonomi terkait dengan bagaimana meningkatkan sektor-sektor

perekonomian dalam negeri. Dalam hal diplomasi ekonomi, Kemlu akan memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan diplomasi ekonomi yang berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan Kemenlu melalui perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai pelaksana diplomasi ekonomi, yang diwakili oleh para diplomatnya harus dapat menjadikan dirinya tidak hanya sebagai *marketers*, tetapi juga sebagai *opportunity seekers* bagi berbagai peluang baik berupa perdagangan, turisme, serta investasi. Diplomasi ekonomi secara singkat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mempromosikan potensi ekonomi suatu negara. Diplomasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi, yang mencakup perdagangan komoditas, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan dan kerja sama teknik yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah global. (BPPK, 2015)

Peran perwakilan Indonesia sangat strategis dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Pejabat di perwakilan Indonesia harus memiliki kemampuan *market intelligence* untuk melihat potensi dan peluang kerja sama di negara akreditasinya. Para diplomat juga dituntut untuk bisa menjalankan perannya sebagai *trade policy intelligence* dengan cara pengamatan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan menyampaikan saran kepada pusat terkait kebijakan yang dapat Indonesia ambil dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah setempat. Jika kepentingan ekonomi Indonesia berpotensi terancam dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut, para diplomat kemudian harus dapat berperan sebagai negosiator untuk membela kepentingan Indonesia. (Kemlu, 2015)

Di bidang perdagangan, diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan pada upaya untuk membidik pasar non tradisional bagi produk-produk ekspor dari Indonesia. Selama ini ekspor

dari Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar tradisional seperti Jepang, Amerika, Singapura, Taiwan, Korea serta negara-negara di kawasan di Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, Inggris, Perancis, serta Italia. Dengan tidak hanya berorientasi pada pasar tradisional, pasar-pasar non tradisional seperti negara non Uni Eropa; Skandinavia, Turki, Kanada, Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia berpotensi bagi peningkatan nilai perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Negara-negara di kawasan Amerika Latin serta Eropa Timur dan Tengah juga merupakan pasar alternatif bagi produk ekspor dari Indonesia (Direktorat Ekspor Nasional, 2016). Peningkatan nilai perdagangan dan investasi dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif hendaknya dijalankan dengan tetap mempertahankan hubungan yang telah terjalin dengan baik dengan pasar tradisional. Dengan berubahnya paradigma pangsa pasar bagi pemasaran produk ekspor Indonesia dari pasar tradisional ke pasar non tradisional serta pasar alternatif, nilai perdagangan serta investasi Indonesia diharapkan akan mengalami peningkatan.

Di bidang pariwisata, pada *event* World Economic Forum tahun 2013, Indonesia memperoleh posisi ke-70 sebagai negara dengan daya saing pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah RI terus berusaha untuk dapat memperbaiki daya saing pariwisatanya dengan menargetkan posisi ke 30 pada tahun 2019. Pada tahun 2014, bidang pariwisata berkontribusi sebesar 3.78% bagi perekonomian nasional. Sedangkan devisa yang ikut disumbangkan dari sektor pariwisata adalah sebesar US\$ 10.69 miliar. Target kunjungan dari wisatawan mancanegara pada tahun 2014 mampu memenuhi target dari pemerintah, yaitu sebesar 9.3 juta, sedangkan jumlah wisatawan dari nusantara tercatat sebesar 251 juta (www.kemenkeu.go.id). Pemerintah Indonesia selama ini menargetkan 19 negara sebagai fokus utama pariwisata Indonesia di antaranya Jepang, Korea Selatan, Rusia, Australia serta China. Tahun 2014 tercatat bahwa ada 4 (empat) negara yang paling banyak melakukan kunjungan ke

Indonesia, yaitu: Singapura, Malaysia, Australia dan China.

Pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional akan menjadi 8%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, serta menciptakan 13 juta lapangan kerja. Selain itu target kunjungan wisman meningkat menjadi 20 juta wisatawan manca dan wisnus naik menjadi 275 juta, serta daya saing pariwisata Indonesia akan meningkat berada di ranking 30 besar dunia (maritim.go.id, 2015). Target ini tentunya akan tercapai jika ditunjang oleh pembangunan infrastruktur serta konektifitas yang memadai sehingga akses untuk mencapai tempat-tempat berpotensi wisata dapat diakses dengan mudah. Ketersediaan *direct flight* menuju titik-titik utama pariwisata Indonesia juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu, kebijakan pemerintah dengan pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 5 negara yakni; Australia, Jepang, Korea, China, dan Rusia yang mulai diterapkan tahun 2015 merupakan salah satu trigger bagi meningkatnya jumlah wisatawan dari negara tersebut sehingga target jumlah wisatawan mancanegara yang telah ditetapkan pemerintah untuk 5 (lima) tahun mendatang akan dapat tercapai.

Pemerintah Indonesia berhasil menggandeng Tiongkok dan mendapatkan bantuan dana 40 Milliar Dollar Amerika guna mendukung terwujudnya visi poros maritim dunia sebagai tonggak dari diplomasi ekonomi Indonesia. Selain itu, strategi yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menjalin kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok yang akan direalisasikan melalui kerja sama konkret. Dengan tujuan sebagai penguatan diplomasi ekonomi, prioritas kerja sama akan lebih ditingkatkan pada penyelesaian berbagai isu yang tertunda dengan beberapa Negara yang menjalin kerja sama dengan Indonesia, salah satunya adalah Tiongkok. Beberapa kerja sama dengan Tiongkok yang harus segera ditindak lanjuti adalah percepatan pembangunan kawasan

industri terpadu dan program pembangunan lima tahun untuk kerja sama ekonomi dan perdagangan.

KESIMPULAN

Melihat fakta yang terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia terus melanjutkan kerja sama dengan China guna melebarkan sayap diplomasi ekonominya. Pemerintah Indonesia pada masa Jokowi mencoba untuk terus kontinu melakukan kerja sama dengan Tiongkok dengan maksud untuk menambah jumlah frekuensi kerja sama antara kedua negara. Hal tersebut dilakukan oleh Jokowi dengan menekankan pada empat poin penting. Pertama, menggunakan identitas maritim dalam percaturan kerja sama internasional dan diplomasi ekonomi. Kedua, mengembangkan peran global melalui pendekatan diplomasi. Ketiga, penguatan diplomasi ekonomi melalui proses kerja sama di berbagai sektor seperti infrastruktur, industri, pariwisata, dan perbankan. Keempat, Jokowi mencoba menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam isu poros maritim dunia menyusul Tiongkok sebagai bagian dari Nawacita yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amstutz MR. 1995. *“International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics”*. Dubuque: Brown & Benchmark.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. 2016. *Upaya Peningkatan Ekspor Nasional Melalui Diplomasi Ekonomi*

Lenter, H. 1974. *“Foreign Policy Analysis: a Comparative and Conceptual Approach”*. Ohio: Charles F. Merrill Publishing Company.

David L. McConnell (eds). 2008. *Soft Power Super powers Cultural and National*

Assets of Japan and the United States. New York: M.E. Sharpe

Mas’oed M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Liriyanti. 06260030. 2011. *CCTV Internasional Sebagai China’s Soft Power untuk Membendung Image Negatif China*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Khurana. 2008. *China India Maritime Rivalry*, Indian Defense Review Vol. 23 No. 4

Intan S. 2016. *Reframing Indonesian Foreign Politic On the New International Order: The Case of Indonesian China Relation on Asian Century*

Prawirasaputra, Sumpena. *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Bandung: Remaja Karya.

Rosenau NJ. 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*, New York: The Free Press.

Subagyo, PJ. 2005. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Surya P. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia di Era Pemerintahan Jokowi*, FISIP Universitas Mulawarman.

Matondang E. 2014. *Analisis Kebijakan Poros Maritim Dunia dalam Konteks Peningkatan Konektivitas Nasional dan Regional*, Bogor: Unievrstias Pertahanan.

Pujayanti, A. *Budaya Maritim, Geopolitik dan Tantangan Keamanan Indonesia*.

Perwita, B. dkk. *Jokowi’s Maritime Axis*, Jakarta: President University.

Soebagjo N, Pattiradjawanne. 2015. *Global Maritime Axis: Indonesia, China, and New Approach to Southeast Asian Regional*

Resilience, *International Journal of China Studies* Vol. 6 No. 2

Wuryandari, G. 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Zielonka R. 2015. *China's Maritime Silk Road and Indonesia's Maritime Axis*, European Institute for Asian Studies.

Hendrajit. 2014. *Skema BRICS dalam Membangun Skema Kerjasama Kemaritiman Indonesia dan Luar Negeri*, diakses via <http://www.theglobal-review.com/> pada tanggal (03/04/2017)

Hendrahit. 2015. *Presiden Jokowi Harus Fokuskan Sektor Maritim, Perdagangan, dan Investasi di G-20* diakses via <http://www.theglobal-review.com/> pada tanggal (03/04/2017)

Ngasuko A. 2015. *Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Ekonomi ASEAN* diakses via <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/daya-saing-sumber-daya-manusia-indonesia-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean> pada tanggal (04/04/2017)